

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI ANGGARAN
DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR**

***THE EFFECT OF PUBLIC ACCOUNTABILITY, BUDGET PARTICIPATION
AND INTERNAL CONTROL ON THE PERFORMANCE
AT THE DINAS KESEHATAN KAMPAR DISTRICT***

1) **Sinta Alviani**, 2) **Rahmawati**, 3) **Helmiati**

1) STIE Bangkinang, Kampar, Sintaalviani813@gmail.com

2) STIE Bangkinang, Kampar, Rahmawati662@ymail.com

3) STIE Bangkinang, Kampar, Helmiati@stiebangkinang.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal secara simultan dan parsial terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, *file research*, observasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang berjumlah 104 orang pegawai, sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang diperoleh sebanyak 60 orang pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Analisa data dilakukan dengan model regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji secara simultan, variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal terbukti berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Sedangkan hasil uji secara parsial, variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal terbukti berpengaruh signifikan secara sendiri-sendiri terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Keeratatan hubungan yang terjadi antara variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan publik adalah sangat kuat dengan koefisien korelasi (R) yaitu diperoleh sebesar 88,3%. Sedangkan kontribusi variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yaitu sebesar 77,9%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 22,1% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran, Pengendalian Internal dan Kinerja

ABSTRACT. Research to determine the effect of public accountability, budget participation and internal control on the public service performance with simultaneous and partial at the Dinas Kesehatan Kampar District. Types and sources of data used in this study are primary data and secondary data, while data collection techniques used in this study were questionnaires, *file research*, observation and interviews. The population in this study were all employees at the Dinas Kesehatan Kampar District, while the sampling was carried out using *purposive sampling* obtained as many 60 employees at the Dinas Kesehatan Kampar District. Based on the simultaneous test results, the variable of public accountability, budget participation and internal control have a significant effect with together on the performance at the Dinas Kesehatan Kampar District, while based on the partial test results, the variable of public accountability, budget participation and internal control have a significant effect with individual on the performance at the Dinas Kesehatan Kampar District the closeness of the relationship that occurs between the attractiveness of public accountability, budget participation and internal control on the performance is very strong with a correlation coefficient R of 88,3%, while contribution of public accountability, budget participation and internal control on the performance is equal to 77,9% while the remaining is 22,1% against influenced by other variables not examined in this study.

Keyword: Public Accountability, Budget Participation, Internal Control and Performance

A. PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, propinsi serta daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fisik dan menjelaskan pembagian mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan serta pelayanan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

Penilaian pencapaian kinerja terhadap sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi untuk pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tertuju pada sasaran kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat dengan kategori Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup Baik (CB), Tidak Baik (TB) dan Sangat Tidak Baik (STB). Pencapaian kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Tahun 2015-2019

| No | Tahun | Jumlah Pegawai (Orang) | Kinerja Pegawai (Orang) | | | | |
|----|-------|------------------------|-------------------------|----|----|----|-----|
| | | | SB | B | CB | TB | STB |
| 1 | 2015 | 102 | 59 | 38 | 5 | - | - |
| 2 | 2016 | 102 | 60 | 37 | 5 | - | - |
| 3 | 2017 | 106 | 59 | 38 | 7 | 2 | - |
| 4 | 2018 | 106 | 56 | 37 | 8 | 1 | - |
| 5 | 2019 | 104 | 55 | 35 | 9 | - | - |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, 2020

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar masih belum mencapai pencapaian kinerja yang diharapkan. Hal ini dapat kita lihat dari hasil kinerja pegawai dengan kategori Sangat Baik (SB) dan Baik (B) mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2015, hasil kinerja pegawai dengan kategori Sangat Baik (SB) berjumlah 59 orang pegawai. Hingga di Tahun 2019, hasil kinerja pegawai dengan kategori Sangat Baik (SB) hanya berjumlah 55 orang pegawai. Pegawai dengan kategori hasil kinerja Baik (B) juga mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2015 berjumlah 38 orang pegawai, hingga di Tahun 2019 hanya berjumlah 35 orang pegawai. Pada Tahun 2017 dan 2018, masih terdapat pegawai dengan kategori penilaian kinerja Tidak Baik (TB). Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai diantaranya akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal.

Dengan akuntabilitas publik maka akan membentuk suatu kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban serta adanya keterangan. Reformasi pengelolaan keuangan daerah telah lama dilakukan, Laporan keuangan daerah yang dibuat memang belum seutuhnya sempurna. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik diperlukan sumber daya manusia yang terampil pada pemerintah daerah dan dibutuhkan sistem dan prosedur yang memadai serta pedoman akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, anggaran yang disusun hendaknya dapat mengakomodir kepentingan setiap bidang yang terkait dalam pelaksanaan pencapaian tujuan. Untuk itu diperlukan partisipasi dalam penyusunan anggaran oleh berbagai pihak dalam sebuah organisasi, baik dari manajemen tingkat atas (*top level management*) maupun manajemen tingkat bawah (*lower level management*). Pihak-pihak inilah yang akan memainkan peranan penting dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Inti dari partisipasi penyusunan anggaran adalah diperlukan kerjasama antara seluruh tingkatan organisasi. Manajer puncak biasanya kurang mengetahui bagian sehari-hari, sehingga harus mengendalikan informasi anggaran yang lebih rinci dari bawahannya. Adapun capaian kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Capaian Kinerja Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Tahun 2015-2019

| No | Kinerja Keuangan (Tahun) | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Kinerja (%) |
|----|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2015 | 161.765.687.119 | 152.875.543.442 | 94,50 |
| 2 | 2016 | 164.656.783.749 | 151.643.967.322 | 92,09 |
| 3 | 2017 | 168.654.398.786 | 157.475.422.329 | 93,37 |
| 4 | 2018 | 164.499.489.654 | 149.610.342.523 | 90,94 |
| 5 | 2019 | 171.178.388.675 | 159.043.423.575 | 92,91 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, 2020

Dari Tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir capaian kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sudah baik namun persentase capaian kinerja keuangan belum mencapai 100%. Hal ini diindikasikan karena tidak semua pegawai yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan maupun proses evaluasi. Oleh karna itu, partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar perlu ditingkatkan, tidak terkecuali pada pihak bawahan karena dengan adanya partisipasi dari bawahan dalam menyusun anggaran, maka bawahan merasa terlibat dan harus bertanggung jawab pada pelaksanaan anggaran dengan lebih baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam sektor kesehatan kepada masyarakat yang optimal.

Pengendalian internal dalam suatu organisasi menjadi faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Pengendalian internal bertujuan untuk melindungi kekayaan organisasi dengan cara meminimalisasi penyimpangan dan pemborosan serta memaksimalkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi/instansi pemerintah. Pada prakteknya kinerja pemerintah seringkali dinodai oleh praktek-praktek penyimpangan dan tindakan inefisiensi yang dilakukan aparat pemerintah, hal ini menurunkan kualitas pelayanan publik yang disisi lainnya sudah merupakan sorotan. Kondisi ini tidak terlepas dari masih buruk nya mekanisme pengawasan, masih kurangnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, serta lemahnya pengendalian internal. Praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maraknya kasus gratifikasi dan kasus suap menunjukkan belum kuatnya integritas dan nilai etika pada pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian intenal berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian intenal secara simultan dan parsial terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

Kinerja

Menurut Robbins dan Timotthy (2014:2), kinerja layanan umum adalah hasil kerja dalam memberikan pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Sedangkan menurut Fahmi (2011:24), kinerja pelayanan umum sebagai hasil kerja dalam bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dandilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangkapelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundangundangan. Penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi satuan kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, menjadi penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah.

Akuntabilitas Publik

Aswan (2016:89), akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik perlu memperhatikan fungsi akuntabilitas itu sendiri yaitu sebagai berikut (Mulyadi, 2017:110):

- a. Sebagai komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Menjadi suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menunjukkan suatu tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Partisipasi Anggaran

Catur dan Safrida (2015:64) menyatakan bahwa pada penyusunan dengan menggunakan pendekatan partisipasi, informasi anggaran yang didapat oleh manajemen puncak digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial fungsional dan mendistribusikan penghargaan dan hukuman. Sedangkan Charles (2016:404) berpendapat bahwa fungsi partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah sebagai pengendalian dan perencanaan. Perencanaan mencakup pengembangan tujuan untuk masa depan, sedangkan pengendalian digunakan untuk menjamin bahwa seluruh fungsi manajemen dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi anggaran memiliki beberapa fungsi yaitu :

- a. Partisipasi anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil dari perundingan antara anggota organisasi yang dominan, yang menunjukkan persetujuan organisasi mengenai tujuan operasi untuk masa depan.
- b. Partisipasi anggaran merupakan *blueprint* bagi perusahaan untuk bertindak yang menggambarkan prioritas manajemen dalam mengalokasikan sumber daya dan menunjukkan bagaimana bagian organisasi diharapkan bekerja dalam mencapai keseluruhan tujuan perusahaan.
- c. Partisipasi anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai departemen atau divisi dalam organisasi.
- d. Partisipasi anggaran bertindak sebagai standar untuk melakukan evaluasi.
- e. Partisipasi anggaran sebagai alat pengendali yang memungkinkan manajemen menunjukkan area dimana perusahaan kuat dan lemah.
- f. Partisipasi anggaran berusaha mempengaruhi dan memotivasi manajer untuk bertindak efektif dan efisien.

Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara umum pengendalian internal (*Internal Control*) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalagunaan, memastikan bahwa informasi akurat dan memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya. Sebuah organisasi juga menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan operasi dan mencegah penyalagunaan sistem. Pengendalian internal memberikan jaminan bahwa aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha, informasi bisnis akurat, karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan (Zainuddin, 2017:46).

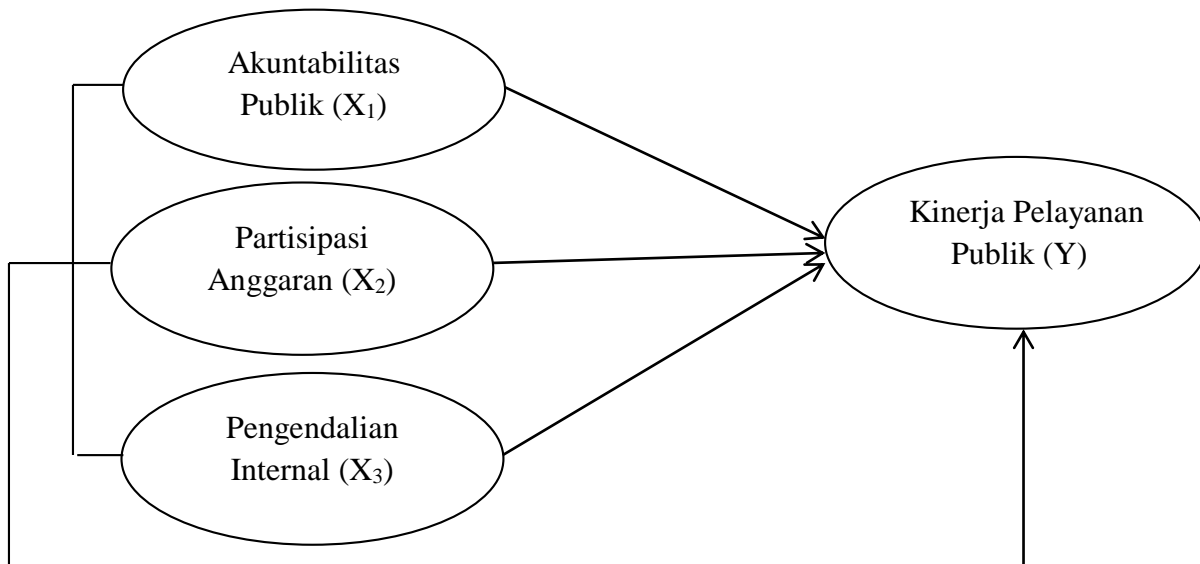
Evi (2018: 412) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian Internal yang berjalan dengan efektif akan membuat laporan keuangan lebih dapat dipercaya, penggunaan sumber daya organisasi menjadi lebih efektif dan efisien, serta tidak terjadinya pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang ada dalam organisasi baik oleh pegawai maupun pimpinan.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

Model Penelitian

Model dalam penelitian ini adalah :



Gambar 1. Model Penelitian

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah :

1. Kinerja (Y) adalah hasil kerja dalam memberikan pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan (Robbins dan Timothy, 2014:70). Indikator dari variabel ini adalah kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, kemandirian, inisiatif, adaptabilitas, efisiensi waktu, efektif, inovatif, tanggung jawab dan reaksi (Robbins dan Timothy, 2014:76).
2. Akuntabilitas publik (X_1) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Aswan, 2016:89). Indikator dari variabel ini adalah akuntabilitas hukum, akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas moral, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas finansial, akuntabilitas proses akuntabilitas administrasi atau organisasi serta akuntabilitas profesional (Aswan, 2016:99).
3. Partisipasi anggaran (X_2) adalah proses dimana individu terlibat dalam penyusunan target anggaran, lalu individu tersebut dievaluasi kerjanya dan memperoleh penghargaan berdasarkan target anggaran (Rudianto, 2017:36). Indikator dari variabel ini adalah kesempatan, penilaian, pengawasan, efisiensi biaya, tanggung jawab, kreatif, saran, penghargaan, evaluasi dan termotivasi (Rudianto, 2017:40).
4. Pengendalian internal (X_3) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa informasi akurat serta memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan di patuhi sebagaimana semestinya (Zainuddin, 2017:46). Indikator dari variabel ini adalah lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi, kelancaran komunikasi, aktivitas pengendalian, pemantauan, ketepatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan (Zainuddin, 2017:46).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Waktu penelitian selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui penyebaran kuesioner, *file research*, observasi dan wawancara.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang berjumlah 104 orang pegawai, sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang diperoleh sebanyak 60 orang pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dengan kriteria pegawai menjabat sebagai pejabat struktural atau fungsional, memiliki masa kerja pada posisi tersebut minimal 2 tahun dan ikut menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Analisa data pada penelitian ini dilakukan dengan model persamaan regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja,

α = Konstanta,

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi,

X_1 = Akuntabilitas Publik,

X_2 = Partisipasi Anggaran,

X_3 = Pengendalian Internal,

ε = *Error Term*.

Selanjutnya pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji F dan uji t dengan alpha 5%.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25.00 diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Y = 14,415 + 0,332 X_1 + 0,255 X_2 + 0,464 X_3$$

Dari persamaan diatas, diketahui nilai konstanta (α) sebesar 14,415. Angka ini bertanda positif dan memberikan arti bahwa jika diasumsikan akuntabilitas publik tidak ada ($X_1=0$), partisipasi anggaran tidak ada ($X_2=0$), dan pengendalian internal tidak ada ($X_3=0$) maka kinerja (Y) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar masih ada sebesar 14,415 satuan. Koefisien regresi variabel akuntabilitas publik (X_1) adalah sebesar 0,332. Angka ini bertanda positif dan memberikan arti jika diasumsikan akuntabilitas publik (X_1) meningkat sebesar 1% sementara partisipasi anggaran dan pengendalian internal konstan atau tidak mengalami perubahan maka kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar akan meningkat sebesar 0,332% dan begitu juga sebaliknya.

Koefisien regresi variabel partisipasi anggaran (X_2) adalah sebesar 0,255. Angka ini bertanda positif dan memberikan arti jika diasumsikan partisipasi anggaran (X_2) meningkat sebesar 1% sementara akuntabilitas publik dan pengendalian internal konstan atau tidak mengalami perubahan maka kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar akan meningkat sebesar 0,255%, dan begitu juga sebaliknya. Koefisien regresi variabel pengendalian internal (X_3) adalah sebesar 0,464. Angka ini bertanda positif dan memberikan arti jika diasumsikan pengendalian internal (X_3) meningkat sebesar 1% sementara akuntabilitas publik dan partisipasi anggaran konstan atau tidak mengalami perubahan maka kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar akan meningkat sebesar 0,464%, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis secara simultan dalam penelitian ini seperti yang terlihat pada Tabel 3

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji-F)

| Model | ANOVA ^a | | | | | |
|-------|--------------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 643,118 | 3 | 214,373 | 65,769 | ,000 ^b |
| | Residual | 182,532 | 56 | 3,259 | | |
| | Total | 825,650 | 59 | | | |

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran

Sumber: Data Olan, 2020

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 65,769 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini memberikan arti bahwa memang benar terdapat pengaruh yang signifikan variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar karena nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel yaitu $65,769 > 4,001$ atau nilai signifikansi lebih rendah dari nilai alpha yaitu $0,000 < 0,050$. Dengan demikian hipotesis secara simultan dapat diterima

pada tingkat keyakinan 95%. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dalam penelitian ini seperti yang terlihat pada Tabel 4

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

| No | Variabel | t-hitung | t-tabel | Sig | $\alpha=5\%$ | Ket |
|----|---------------------------------|----------|---------|-------|--------------|------------|
| 1 | Akuntabilitas Publik (X_1) | 4,601 | 1,672 | 0,000 | 0,050 | Signifikan |
| 2 | Partisipasi Anggaran (X_2) | 2,372 | 1,672 | 0,021 | 0,050 | Signifikan |
| 3 | Pengendalian Internal (X_3) | 4,250 | 1,672 | 0,000 | 0,050 | Signifikan |

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari Tabel 4 diketahui nilai t-hitung variabel akuntabilitas publik (X_1) sebesar 4,601 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sementara t-tabel pada $n = 60$ dan $\alpha 5\%$ diperoleh sebesar 1,672. Hasil ini memberikan arti bahwa memang benar terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel akuntabilitas publik terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Hal ini dapat diterima pada tingkat keyakinan 95% karena nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $4,601 > 1,672$ atau nilai signifikansi lebih rendah dari nilai α yaitu $0,000 < 0,050$.

Nilai t-hitung variabel partisipasi anggaran (X_2) sebesar 2,372 dengan nilai signifikansi sebesar 0,021. Sementara t-tabel pada $n = 60$ dan $\alpha 5\%$ diperoleh sebesar 1,672. Hasil ini memberikan arti bahwa memang benar terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel partisipasi anggaran terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Hal ini dapat diterima pada tingkat keyakinan 95% karena nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $2,372 > 1,672$ atau nilai signifikansi lebih rendah dari nilai α yaitu $0,021 < 0,050$.

Nilai t-hitung variabel pengendalian internal (X_3) sebesar 4,250 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sementara t-tabel pada $n = 60$ dan $\alpha 5\%$ diperoleh sebesar 1,672. Hasil ini memberikan arti bahwa memang benar terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel pengendalian internal terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Hal ini dapat diterima pada tingkat keyakinan 95% karena nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu $4,250 > 1,672$ atau nilai signifikansi lebih rendah dari nilai α yaitu $0,000 < 0,050$. Hasil pengujian koefisien korelasi dan determinasi dalam penelitian ini seperti yang terlihat pada Tabel 5

Tabel 5. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2)

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,883 ^a | ,779 | ,767 | 1,805 | 2,510 |

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari Tabel 5 dapat dilihat koefisien (R) diperoleh sebesar 0,833. Hal ini memberi arti bahwa keeratan hubungan variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal adalah sangat kuat terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar karena berada pada interval koefisien 0,800-1,000. Selanjutnya besarnya koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,779. Hal ini memberikan arti bahwa variasi kinerja pelayanan publik sebesar 77,9% ditentukan oleh variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal sedangkan sisanya sebesar 22,1% lagi ditentukan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji secara simultan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Selanjutnya, berdasarkan uji koefisien korelasi diketahui bahwa keeratan hubungan variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal adalah sangat kuat terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Sedangkan kontribusi variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal terhadap kinerja diperoleh sebesar 77,9% sedangkan sisanya sebesar 22,1% lagi ditentukan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nova CH Mamuaya dan Cecilia Lelly Kewo (2019), yang menyimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan pengendalian internal terbukti berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pelayanan publik pada Aparatur Pemerintah

Kabupaten Minahasa. Hasil yang sama juga diteliti oleh Desy Amalia Candrakusuma (2017) yang menyimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran berpengaruh *signifikan* secara simultan terhadap kinerja pelayanan publik pada SKPD Kabupaten Sragen.

Berdasarkan uji secara parsial terhadap variabel akuntabilitas publik (X_1) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Hasil ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Charles (2016:84), yang menyatakan bahwa kinerja pelayanan publik akan bersifat akuntabel apabila kewajiban yang telah dilaksanakan mampu dipertanggung jawabkan serta mampu menerangkan hasil dari kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggung jawaban dan keterangan tersebut, sehingga dengan akuntabilitas publik maka segala kewajiban suatu organisasi pemerintah untuk mengelola sumber daya, pelaporan, pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik akan mampu dipertanggung jawabkan kepada pemberi mandat (pemerintah pusat) dan publik lain yang membutuhkan. Hal yang sama juga didukung oleh teori Hansen dan Mowen (2016:167) yang menyatakan bahwa didalam membentuk kinerja pelayanan publik yang akuntabel maka seluruh kewajiban yang telah terlaksana mampu untuk menyampaikan hasil pertanggung jawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Akuntabilitas publik berarti hasil kinerja yang telah dicapai ditentukan dari suatu pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan secara periodik.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Desy Amalia Candrakusuma (2017) yang menyimpulkan bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh *signifikan* secara parsial terhadap kinerja pelayanan publik pada SKPD Kabupaten Sragen. Selanjutnya Hasil penelitian Erica Magdalena (2016) yang menyimpulkan bahwa variabel akuntabilitas publik terbukti berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pelayanan publik instansi pemerintah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).

Berdasarkan uji secara parsial terhadap variabel partisipasi anggaran (X_2) menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Hasil ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Rudianto (2017:44), yang menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi anggaran didalam kinerja pelayanan publik maka akan membentuk suatu konsep dimana bawahan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya, sehingga menjadi sebuah proses dimana individu terlibat dalam penyusunan target anggaran, lalu individu tersebut dievaluasi kerjanya dan memperoleh penghargaan berdasarkan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal yang sama juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Nafarin (2016:45), yang menjelaskan bahwa penerapan partisipasi anggaran (*budget*) dalam kinerja pelayanan publik membentuk suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standard dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Desy Amalia Candrakusuma (2017) yang menyimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh *signifikan* secara parsial terhadap kinerja pelayanan publik pada SKPD Kabupaten Sragen. Selanjutnya hasil penelitian Restu Agusti (2017) yang menyimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pelayanan publik pada aparatur pemerintah daerah dengan dimoderasi oleh variabel desentralisasi dan budaya organisasi (studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis).

Berdasarkan uji secara parsial terhadap variabel pengendalian internal (X_3) menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Hasil ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Fahmi (2011:66), yang menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik maka pihak manajemen perlu melakukan pengendalian internal sebagai bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuan. Pengendalian internal meliputi semua rencana dan metode yang dilakukan organisasi serta kebijaksanaan yang terkoordinir dengan maksud untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan data akuntansi dapat dipercaya, efisiensi dan efektifitas sumber daya organisasi, serta mendorong ditaatinya peraturan yang terdapat dalam organisasi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh teori Evi (2018: 412), yang menjelaskan bahwa pengendalian internal yang berjalan dengan efektif akan membuat laporan keuangan lebih dapat dipercaya, penggunaan sumber daya organisasi menjadi lebih efektif dan

efisien serta tidak terjadinya pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang ada dalam organisasi baik oleh pegawai maupun pimpinan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rina Tresnawati (2017) yang menyimpulkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh *signifikan* secara parsial terhadap kinerja pelayanan publik pada instansi pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Selanjutnya Hasil penelitian Erica Magdalena (2016) yang menyimpulkan bahwa variabel pengendalian internal terbukti berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pelayanan publik instansi pemerintah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara simultan, variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal terbukti berpengaruh *signifikan* terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
2. Secara parsial, variabel akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan pengendalian internal terbukti berpengaruh *signifikan* terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dengan variabel pengendalian internal sebagai faktor dominan terhadap kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
3. Kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 77,9% sedangkan sisanya 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

E. Daftar Pustaka

Aswan, Bakri, 2016, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Catur, Sasongko dan Safrida, Rumondang, 2010, *Anggaran*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Charles T, Horngen, 2016, *Akuntansi di Indonesia Buku Satu*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Desy Amalia Candrakusuma, 2017, *Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada SKPD Kabupaten Sragen*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Volume 24, Nomor 1, ISSN: 1412-3126.

Erica Magdalena, 2016, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*, JOM FEKON, Volume 1, Nomor 2, ISSN: 9989-9978.

Evi, Karisma, M, 2018, *Manajemen Biaya*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Fahmi, Irfan, 2011, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Hansen, Charles dan Mowen, Jhon, 2016, *Manajemen Keuangan*, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Publik.

Mulyadi, 2017, *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Penerbit BP STIE YKPN, Yogyakarta.

Nafarin, Hansiadi, 2016, *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Tiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Nova CH Mamuaya dan Cecilia Lelly Kewo, 2019, *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 1, ISSN:9989-9999.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Intern Pemerintah.

- Restu Agusti, 2017, *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi Oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)*, Jurnal Ekonomi. Volume 20, Nomor 3, ISSN:1412-1221.
- Rina Tresnawati, 2017, *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung*. Forum Bisnis dan Keuangan, Volume 1, Nomor 2, ISBN:978-602-17225-0-3.
- Robbins dan Timotthy, 2014, *Perspektif Manajemen Keuangan*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Rudianto, 2017, *Penganggaran Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Zainuddin, Fikri, 2017, *Perspektif Sistem Informasi Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.